



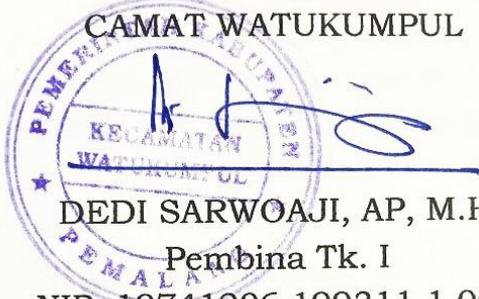
**RENCANA KERJA
(RENJA- PD)
KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Watukumpul, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, Agustus 2022
CAMAT WATUKUMPUL



DEDI SARWOAJI, AP, M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19741206 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023. Renja Kecamatan Watukumpul merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Watukumpul yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Watukumpul melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2023. Renja Kecamatan Watukumpul dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

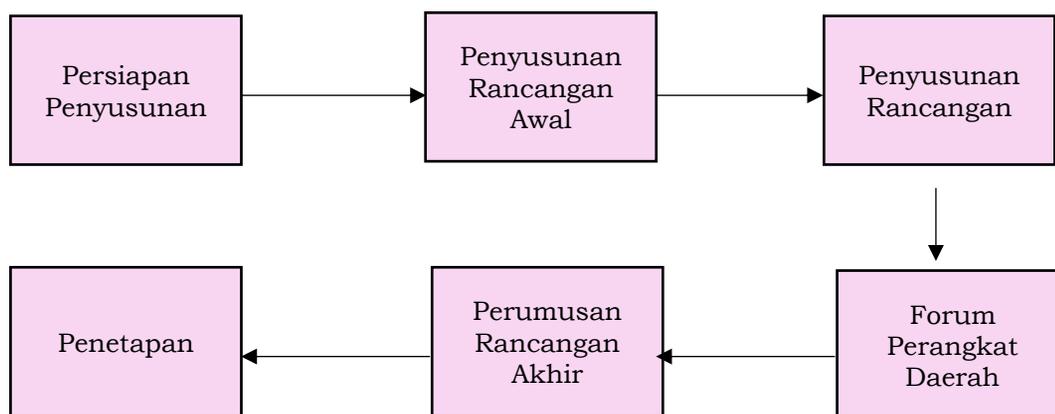
Renja Kecamatan Watukumpul mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Watukumpul mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

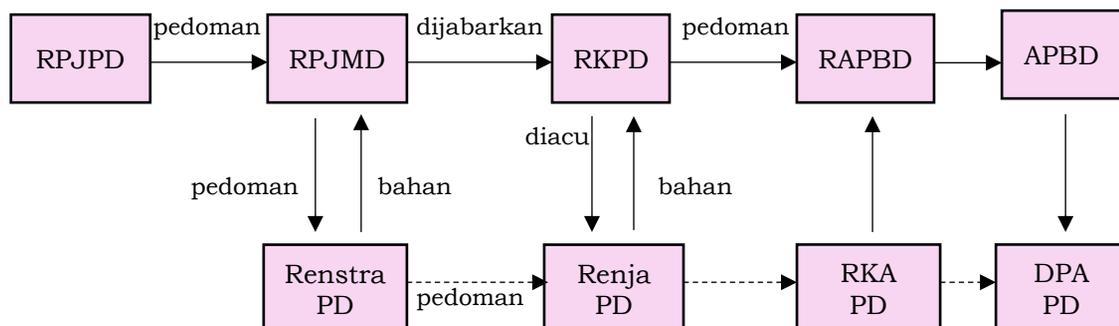
1. Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2021, pengendalian kegiatan tahun 2021, dan RKPD tahun 2023)
2. Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Seksi-seksi
 - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Watukumpul
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023
 - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
 - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul
Tahun 2023



Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Watukumpul tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2023 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Kecamatan Watukumpul berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang tahun 2023, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2023 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Watukumpul tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Watukumpul;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Watukumpul tahun 2023;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2021, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 mengacu pada APBD Tahun 2022 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Watukumpul, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Watukumpul, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Watukumpul, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Watukumpul, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Watukumpul

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Watukumpul pada tahun 2021 dan estimasi tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2021

Jumlah anggaran Kecamatan Watukumpul sebesar Rp. 2.913.819.000,- yang terbagi dalam 5 program, 11 kegiatan dan 41 sub kegiatan Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 2.765.639.827,- atau sebesar 94,92%.

Tahun Anggaran 2022 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran APBD Penetapan Tahun 2022 pada Kecamatan Watukumpul sebesar Rp. 2.786.390.000,- yang terbagi dalam 6 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.195.954.325,- atau sebesar 42,92 %.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2021, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan dengan adanya pandemi Covid 19 membatasi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan juga membatasi rapat koordinasi ke luar daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2021, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Tidak terdapat realisasi capaian dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Ada 5 Program, 11 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
3. Tidak terdapat realisasi capaian dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Komitmen pemimpin di Kecamatan Watukumpul untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
 - b. SDM di Kecamatan Watukumpul cukup mendukung pencapaian target tersebut.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pemalang yaitu tercapai di tahun 2021;
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
 - b. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Watukumpul;
 - c. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP;
 - d. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
 - e. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait, pemerintahan desa dan masyarakat.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Kabupaten Pemalang sebagai berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Watukumpul s/d Tahun 2022 Kabupaten Pemasang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=6+8	10=(9/4*100 %)
	Unsur Kewilayahan								
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)								
7.01 . 7-01.0- 00.0-00.04 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi birokrasi (skor)	37,82	35,52	28,10	79,11%	35,82	63,92	169,01%
		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (skor)	37,30	34,80	41,63	119,63%	35,30	76,93	206,24%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01 . 7-01.0- 00.0-00.04 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	76 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	15 dokumen	27 dokumen	35,52%
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	11 Dokumen	3	3	100%	2	5	45,45%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	100%	1	2	40%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	100%	1	2	40%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	100%	1	2	40%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan	5 Dokumen	1	1	100%	1	2	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		DPA-SKPD yang disusun							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	30 Dokumen	4	4	100%	6	10	33,33%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 Dokumen	3	3	100%	3	6	40%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat	5 Dokumen	3	3	100%	1	4	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		daerah yang tersusun							
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01 . 7- 01.0-00.0- 00.04 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	17/70 Org/bln	16/14	16/14	100%	17/14	17/28	40%
7.01 . 7- 01.0-00.0- 00.04 . 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	5 Dokumen	1	1	100%	1	2	40%
7.01 . 7- 01.0-00.0- 00.04 . 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwu lanan/semeste	20 Dokumen	1	1	100%	4	5	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	nan/Semesteran SKPD	ran SKPD yang tersusun							
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Keluaran Kegiatan								
		Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	15 Dokumen	0	0	0	3	3	20%
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.02 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah	5 Dokumen	0	0	0	1	1	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		SKPD (RKBU) yang tersusun							
7.01.01.2.03.12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	10 Dokumen	0	0	0	2	20%	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	85 Orang	0	0	0	17	20%	
	Hasil Kegiatan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	200%	200%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	125 Stel	0	0	0	25	25	20%
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	17/10 Org/Kegiatan	0	0	0	17/2	17/2	20%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	17/10 Org/Kegiatan	0	0	0	17/2	17/2	20%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	40 Layanan	4	4	100%	8	12	30%
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Lisrtik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4/60 Jenis/Bl n	4/12	4/12	100%	4/12	4/24	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	70 Unit	0	0	0	14	14	20%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	10/60 Jenis/bln	0	0	0	10/12	10/12	20%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	25/60 Jenis/bln	2/12	2/12	100%	25/12	25/24	40%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	3/60 Jenis/bln	2/12	2/12	100%	3/12	3/24	40%
		Jumlah Penggandaan yang tersedia	22.000 Lembar				2.000	2.000	9,09%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	167 Kegiatan	108	108	100%	35	143	85,62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis pada SKPD yang tertata	25 Jenis	0	0	0	5	5	20%
7.01 . 7-01.0- 00.0-00.04 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	37 Unit	6	6	100%	5	11	29,72%
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	5 Unit	4	4	100%	1	5	100%
7.01.01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	10 Unit	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	20 Unit	0	0	0	4	4	20%
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	2 Unit	2	2	100%	0	2	100%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	20 Jasa	3	3	100%	4	7	35%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	4.000 Surat	800	800	100%	800	1.400	35%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3/60 Jenis/Bln	3/12	3/12	100%	3/12	3/24	40%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	3/60 Jenis/Bln	0	0	0	3/12	3/12	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
.7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	11/60 Org/Bln	9/12	9/12	100%	9/12	9/24	40%
7.01 . 7-01.0- 00.0-00.04 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	277 Unit	31	31	100%	45	76	27,43%
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Bia	Jumlah kendaraan	95 Unit	16	16	100%	17	33	33,89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	ya Pemeliharaan,Pajak,dan,Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinas yang berizin dan terpelihara							
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	140 Unit	13	13	100%	20	33	23,57%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	15 Unit	0	0	0	3	3	20%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	11 Unit	3/76	3/76	100%	3	6	54,55%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	16 Unit	1/44	1/44	100%	2	3	18,75%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	93,33%	36,67%	36,67%	100%	93,33%	130%	139,2%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan								
	Keluaran Kegiatan	Jenis data pemerintahan yang dipublikasi	25 Data	0	0	0	5	5	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	95%	95%	95%	95%	95%	190%	200%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	25 Data	0	0	0	5	5	20%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	25 Kasus	0	0	0	5	5	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	50 Peraturan	0	0	0	10	10	20%
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	30 Layanan	0	0	0	6	6	20%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	25 Kasus	0	0	0	5	5	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Wilayah Kecamatan								
7.01 . 7-01.0- 00.0-00.04 . 02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar limpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	35 Kewenan gan	2	2	100%	7	9	25,71%
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	75%	75%	75%	75%	75%	150%	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pengajuan perizinan non usaha yang dilayani	500 Izin	200	200	100%	100	300	60%
7.01.02.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	75 Dokumen	15	15	100%	15	30	40%
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	100 Surat	0	0	0	20	20	20%
7.01.02.2.04 .03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	35 Kewenangan	0	0	0	7	7	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100%	100	100	100%	100	100	100%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta musrenbang (desa/kelurahan+kecamatan)	375 Orang	31	31	100%	75	106	28,26%
	Hasil Kegiatan	Rerata dari persentase kehadiran Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah	Jumlah peserta sosialisasi musrenbang	125 Orang	15	15	100%	25	40	32%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perencanaan Pembangunan di Desa	desa /kelurahan							
7.01.03.2.01 .02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di Lakukan Oleh Pemerintah dan Suasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang kecamatan	375 Orang	1	1	100%	75	76	20,26%
7.01.03.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil musrenbang kabupaten yang didampingi	45 Desa	15	15	100%	15	30	66,66%
		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	25 Lembaga	0	0	0	5	5	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang difasilitasi							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibun tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	0	0	0	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat Kapasitasnya	300 Orang	0	0	0	60	60	20%
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesi,Tentara Nasional Indonesi dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	300 Orang	0	0	0	60	60	20%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah perda dan perbup yang dikoordinasikan penegakannya	50 Peraturan	0	0	0	10	10	20%
	Hasil Kegiatan	Persentase perda dan perbup yang dikoordinasika	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		n penegakkannya							
7.01.04.2.02 .01	Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah perda dan perbup yang di monitoring	50 Peraturan	0	0	0	10	10	20%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	95%	95%	100%	100%	195%	195%
7.01 . 7-01.0- 00.0-00.04 . 05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/K egiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penugasan Kepala Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	150 Orang	2	2	100%	30	32	21,33%
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.05.2 .01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah Laporan kegiatan peringatan hari besar Nasional,Hari jadi kabupaten,Har	15 Dokume n	2	2	100%	3	5	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	i besar agama, Festival budaya yang tersusun							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi ,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi ,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	150 Orang	15	15	100%	30	45	30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01 .05	Penanganan Konflik Sosisal Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	20 Kasus	0	0	0	4	4	20%
7.01.05.2.01 .08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi forkompimcam	10 Tema	0	0	0	2	2	20%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	93,33%	73,33%	73,33%	100%	80%	153,33%	164,29%
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola	15 Desa	10	10	100%	8	18	120%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pemerintahan baik							
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	75%	75%	75%	75%	75%	150%	200%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan perturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades	15/10 Desa/Kegiatan	135	135	100%	15/2	150	111,11%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	15/5 Desa/Kegiatan	15	15	100%	15/1	30	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15/10 Desa/Kegiatan	15	15	100%	15/2	30	200%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	45/10 Orang/Kegiatan	2	2	100%	45/2	47	104,44%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	12 Desa	2	2	100%	1	3	25%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah peserta	30/5	4	4	100%	30/1	34	113,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	pembinaan uraian tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Orang/Ke giatan						
7.01.06.2..01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	20 Surat	45	45	100%	4	49	245%
7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunando kumen perencanaan desa (RPJMDes)	15/10 Desa/Kegiatan	60	60	100%	15/2	75	500%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01 .13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	15/10 Desa/Ke giatan	15	15	100%	15/2	30	200%
7.01.06.2.01 .16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	60/5 Orang/Kegiatan	6	6	100%	60/1	66	110%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul Tahun 2021 dan 2022 serta proyeksi Tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		82	84	86	88	89,97	89,99	86	88	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		93,33	94,67	94,67	96,00			94,67	96,00	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				35,52	35,82	36,32	36,82	28,10	39,53	36,32	36,82	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks	-		-	34,80	35,30	35,80	36,30	41,63		35,80	36,30	
5	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%				93,33	93,33	93,33	93,33	100	70	93,33	93,33	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	-	-	100	100	100	100	100	0	100	100	
7	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	-	-	-	73,33	80	80	86,67	73,33	40	80	86,67	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa,

pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Cakupan layanan kecamatan
- c. Nilai SAKIP
- d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
- f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
- g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
- h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
- i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2021, IKM Kecamatan Watukumpul sebesar 89,97 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Watukumpul. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2021, cakupan layanan Kecamatan Watukumpul tersebut mencapai 93,33% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Watukumpul meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan

Bupati kepada Camat baru terlaksana 9 kewenangan dari total 35 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 25,71%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Capaian persentase masyarakat desa yang aktif sebesar 100% namun masih perlu didorong partisipasi masyarakat desa dan lembaga masyarakat pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Watukumpul. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 73,33% yaitu sebanyak 11 desa dari 15 desa di Kecamatan Watukumpul. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Watukumpul.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2021, Kecamatan Watukumpul mendapat nilai SAKIP sebesar 41,63 dan IRB sebesar 28,10 sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Watukumpul untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Watukumpul perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Watukumpul untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Watukumpul yaitu:

- a. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia
- b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan
- c. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan

- d. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- e. Masih rendahnya desa bertata Kelola pemerintahan baik
- f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
- g. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Watukumpul juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan
- f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
- g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Watukumpul justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur,
Agamis dan Ngangeni”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia

sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
- d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
- f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

a. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

b. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

c. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Watukumpul mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Watukumpul mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital

(Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 adalah **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2023, diarahkan pada **“Peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana.
- b. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul.
- c. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19.
- d. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI).
- e. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur.
- f. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul tahun 2023, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;

6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Watukumpul mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul adalah :

1. Dampak global dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penurunan pendapatan mengakibatkan potensi menurunnya kinerja tahun 2023.
2. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

3. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Watukumpul.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjangkaran masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;

3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Watukumpul dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul. Renja Kecamatan Watukumpul disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Watukumpul dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Method* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Watukumpul.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN WATUKUMPUL				2,786,390,000	KECAMATAN WATUKUMPUL				2,683,934,500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 skor	2,500,390,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 skor	2,381,934,500	
	1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</i>	14 dokumen	14,500,000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</i>	14 dokumen	14.500.000	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.000.000	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dokumen	2.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.000.000	
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	2.000.000	
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	2,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	2.500.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun</i>	<i>5 laporan</i>	2,124,336,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun</i>	<i>5 laporan</i>	1,983,880,500	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 orang	2,120,336,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 orang	1,981,880,500	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2,000,000	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 laporan	0	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun</i>	<i>3 dokumen</i>	3,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun</i>	<i>3 dokumen</i>	0	
1)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah SKPD (RKBUD) yang tersusun	1 dokumen	1,500,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah SKPD (RKBUD) yang tersusun	1 dokumen	0	
2)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 laporan	1,500,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 laporan	0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas</i>	17 orang	5,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas</i>	17 orang	0	
1)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	17 orang	2,500,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	17 orang	0	
2)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	17 orang	2,500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	17 orang	0	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</i>	8 Paket	111,114,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</i>	8 Paket	122,994,000	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	5,000,000	
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 jenis	67,305,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 jenis	67,305,000	
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 jenis	6,500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 jenis	6,500,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	32,309,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	44,189,000	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</i>	5 unit	40,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</i>	5 unit	35,000,000	
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	30,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	0	
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	35,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	35,000,000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	72 Laporan	156,440,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	72 Laporan	165,560,000	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	12 laporan	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	12 laporan	6,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	21,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	21,000,000	
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	5,000,000	
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	124,440,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	133,560,000	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i>	22 unit	46,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i>	22 unit	60,000,000	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	28,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	42,000,000	
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	3,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	15,000,000	
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 persen	36,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 persen	36,000,000	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jenis dokumen pemerintahan yang dipublikasi</i>	5 dokumen	5,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jenis dokumen pemerintahan yang dipublikasi</i>	5 dokumen	5,000,000	
1)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	5 laporan	5,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	5 laporan	5,000,000	
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		<i>Jenis dokumen pelayanan kepada masyarakat yang terselesaikan (dokumen)</i>	10 Dokumen	16,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		<i>Jenis dokumen pelayanan kepada masyarakat yang terselesaikan (dokumen)</i>	10 Dokumen	16,000,000	
1)	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	10 dokumen	6,000,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	10 dokumen	6,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	6 laporan	5,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	6 laporan	5,000,000	
3)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	5 laporan	5,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	5 laporan	5,000,000	
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		<i>Jenis dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia</i>	7 kewenangan	15,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		<i>Jenis dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia</i>	7 kewenangan	15,000,000	
1)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	100 dokumen	5,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	100 dokumen	5,000,000	
2)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	15 dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	15 dokumen	10,000,000	
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100 persen	75,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100 persen	86,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Jumlah lembaga peserta musrenbang (Desa + Kecamatan)</i>	45 orang	75,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		<i>Jumlah lembaga peserta musrenbang (Desa + Kecamatan)</i>	15 lembaga	86,000,000	
1)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	15 lembaga	5,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	15 lembaga	5,000,000	
2)	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	1 dokumen	35,000,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	1 dokumen	46,000,000	
3)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 laporan	35,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 laporan	35,000,000	
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100 persen	10,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100 persen	10,000,000	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jenis laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 jenis	5,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<i>Jenis laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1 jenis	5,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5,000,000	
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		<i>Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya</i>	10 peraturan	5,000,000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		<i>Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya</i>	10 peraturan	5,000,000	
1)	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	5,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	5,000,000	
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100 persen	45,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100 persen	45,000,000	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</i>	30 orang	45,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		<i>Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</i>	30 orang	45,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 orang	10,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 orang	10,000,000	
2)	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 orang	25,000,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 orang	25,000,000	
3)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	2 dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pematang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	2 dokumen	10,000,000	
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80 persen	120,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80 persen	125,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		<i>Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik</i>	15 desa	120,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		<i>Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik</i>	15 desa	125,000,000	
1)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 laporan	10,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 laporan	10,000,000	
2)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	15 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	15 dokumen	15,000,000	
3)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15 dokumen	15,000,000	
4)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 dokumen	15,000,000	
5)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	5,000,000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15 dokumen	15,000,000	
7)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	4 dokumen	5,000,000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	4 dokumen	5,000,000	
8)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	15 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	15 dokumen	15,000,000	
9)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	15 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	15 dokumen	15,000,000	
10)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	1 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	1 dokumen	15,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2023 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4

Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Kegiatan Fisik /					
1.	Pengaspalan Jalan Medayu-Pagelaran dan plat besi (Musrenbang Watukumpul 2022)	Desa Medayu Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi	340 M x 3M	02
2.	Pembangunan Jalan Pertanian dukuh Siketul (Musrenbang Watukumpul 2022)	Desa Tambi Kecamatan Watukumpul	150.000.000	Meningkatnya transportasi dan hasil pertanian	293 M x 3,5 M x 0,15 M	01

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
3.	Pembangunan Jalan Igir Sriwing, Majalangu – Danasari (Musrenbang Watukumpul 2022)	Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul	328.466.000	Meningkatnya transportasi	330M x 3 M x 0,20M	03
4.	Peningkatan Jalan Desa Bodas – Pagelaran (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Bodas Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi	2500 x 3M	01
5.	Peningkatan Jalan Desa Watukumpul – Tambi (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi	1000 x 3 M	02
6.	Peningkatan Jalan Desa Pagelaran – Bodas (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Pagelaran Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi	700 x 3 M	03
7.	Peningkatan Jalan Desa Bongas – Tlagasana (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Bongas Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi	700 x 3 M	04
8.	Pembangunan jalan pertanian (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi dan hasil pertanian	1000 x 3 M	05
9.	Pembangunan Jalan Desa Jojogan – Bodas (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi	2000 x 3 M	06
10.	Pembuatan talud jalan pertanian di RT 08 RW 04 Dukuh Penusupan (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa majakerta Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi dan hasil pertanian	160 M x 1,5 M x 0,5 M	07
11.	Pembuatan drainase jalan di RT 07 RW 02 (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Gapura Kecamatan Watukumpul	100.000.000	Meningkatnya transportasi dan hasil pertanian	200 M x T 50 L 30	08
B.	Kegiatan Non Fisik					
1.	Pelatihan Menjahit (Musrenbang Watukumpul 2022)	Desa Gapura Kecamatan Watukumpul	50.000.000	Meningkatnya produktivitas	1 Kelompok (20 Orang)	01
2.	Pelatihan Service HP (Musrenbang Watukumpul 2022)	Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul	50.000.000	Meningkatnya produktivitas	2 Kelompok (20 Orang)	02
3.	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Musrenbang Watukumpul 2022)	Desa Cawet Kecamatan Watukumpul	40.000.000	Meningkatnya produktivitas	30 Orang	03

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
4.	Pelatihan Fermentasi Pakan Ternak (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul	40.000.000	Meningkatnya produktivitas	30 Orang	01
5.	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul	40.000.000	Meningkatnya produktivitas	50 Orang	02
6.	Pelatihan Fermentasi Pakan Ternak (Musrenbang Watukumpul 2021)	Desa Bongas Kecamatan Watukumpul	40.000.000	Meningkatnya produktivitas	30 Orang	03

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WATUKUMPUL

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, dengan prioritas pembangunan 2023 pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana
2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul
3. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19
4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)
5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur
6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Watukumpul harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Watukumpul secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023 adalah “**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Watukumpul tahun 2023, adalah “**Meningkatnya pelayanan kecamatan**”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan *trantibum* tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.;

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2023 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Watukumpul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86,00

2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	94,67
---	--	----------------------------------	---------------------------	---	-------

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2023, Kecamatan Watukumpul merencanakan sebanyak 6 program, 16 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Watukumpul dengan kebutuhan dana sebesar Rp 2.786.390.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WATUKUMPUL

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2023. Berikut program, kegiatan dan sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
7																	
7	01																
7	01	01															
7	01	01	2.01														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 skor	2 dokumen	100 %	2.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 skor	2.500,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	1 Dokumen	100 %	2.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 Skor	2.250,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	1 Dokumen	100 %	2.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 Skor	2.500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	1 Dokumen	100 %	2.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 Skor	2.500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 Skor	2,500,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	4 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 Skor	2,500,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	4 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 Skor	2,750,000
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,124,336,000			2,337,500,000			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	17 orang	100%	2,120,336,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 Skor	2,332,000,000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	1 Laporan	100%	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	35,80 Skor	2,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	4 Laporan	100%	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	35,80 Skor	3,000,000
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						3,000,000					5,000,000			
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	1 Dokumen	100%	1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	35,80 Skor	2,500,000
7	1	1	2.03	12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan	Kecamatan Watukumpul	35,80 Skor	2 Laporan	100%	1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	35,80 Skor	2,500,000
7	1	1	2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,000,000					7,000,000			
7	1	1	2.06	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	IRB	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	17 Orang	100%	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	3,500,000
7	1	1	2.06	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	IRB	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	17 Orang	100%	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	3,500,000
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						111,114,000					125,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IRB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	4 jenis	100%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	5,250,000
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IRB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	25 jenis	100%	67,305,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	68,000,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IRB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	2 jenis	100%	6,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	6,750,000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IRB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	36 Laporan	100%	32,309,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	45,000,000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							40,000,000				45,000,000		
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	IRB	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	1 Unit	100%	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	30,000,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IRB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	4 unit	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	15,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							156,440,000				199,750,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 skor	12 Laporan	100%	6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 skor	6,250,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 skor	36 Laporan	100%	21,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 skor	23,000,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 skor	12 Laporan	100%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 skor	5,500,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IRB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 skor	12 Laporan	100%	124,440,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 skor	165,000,000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							46,000,000					49,800,000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IRB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	16 unit	100%	28,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	30,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IRB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	3 unit	100%	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	3,300,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IRB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Kecamatan Watukumpul	36,32 Skor	3 unit	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		IRB	36,32 Skor	16,500,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							36,000,000				39,500,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							5,000,000				5,500,000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi	Kecamatan Watukumpul	93,33 %	5 Laporan	95%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	5,500,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							16,000,000				17,500,000		
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan	Kecamatan Watukumpul	93,33 %	10 Dokumen	100%	6,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	6,500,000
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan	Kecamatan Watukumpul	93,33 %	6 Laporan	100%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	5,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan	Kecamatan Watukumpul	93,33 %	5 Laporan	100%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	5,500,000
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					15,000,000								16,500,000
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kecamatan Watukumpul	93,33 %	100 Dokumen	75%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	5,500,000
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	Kecamatan Watukumpul	93,33 %	15 Dokumen	75%	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan publik yang tersedia	93,33 %	11,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					75,000,000								82,500,000
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					75,000,000								82,500,000
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Watukumpul	100%	15 lembaga	100%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100%	5,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Watukumpul	100%	1 Dokumen	100%	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100%	38,500,000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Watukumpul	100%	1 Laporan	100%	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	100%	38,500,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10,000,000				11,000,000		
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							5,000,000				5,500,000		
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Jenis laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang tersusun	Kecamatan Watukumpul	100%	1 Laporan	100%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	5,500,000
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							5,000,000				5,500,000		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	Kecamatan Watukumpul	100%	2 Laporan	100%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	5,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	diselesaikan	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					45,000,000				49,500,000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					45,000,000				49,500,000			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase potensi konflik tingkatdesa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Watukumpul	100%	30 orang	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	11,000,000
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik tingkatdesa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Watukumpul	100%	30 orang	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	27,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Watukumpul	100%	2 Dokumen	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	11,000,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				120,000,000							142,000,000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				120,000,000								142,000,000
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	15 Laporan	75%	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	11,000,000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	15 Dokumen	75%	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	16,500,000
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	15 Dokumen	75%	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	16,500,000
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	15 Dokumen	75%	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	16,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun	Kecamatan Watukumpul	0%	0	0%	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	10,000,000
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	15 Dokumen	75%	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	16,500,000
7	1	6	2.01	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	4 Dokumen	75%	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	5,500,000
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	15 Dokumen	75%	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	16,500,000
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	15 Dokumen	75%	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	16,500,000
7	1	6	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	Kecamatan Watukumpul	80%	1 Dokumen	75%	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	80%	16,500,000
TOTAL										2,786,390,000							3,111,050,000	

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Watukumpul merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
2. Renja Kecamatan Watukumpul memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

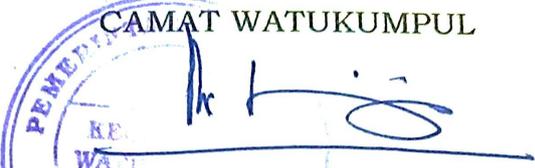
1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Watukumpul secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watukumpul Tahun 2023 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan

Watukumpul Tahun 2023 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023.

CAMAT WATUKUMPUL

DEDI SARWOAJI, AP,M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19741206 199311 1 001

LAMPIRAN



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 199 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2023

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2021 - 2026 melalui program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2021 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
 - b. mengkaji dan mengevaluasi capaian rencana strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026
 - c. menganalisa capaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul berdasarkan rencana kerja sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Watukumpul;
 - e. mengkaji rancangan awal RKPD, peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - f. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar seksi sebagai bahan penyusunan;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026;
 - h. menyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 199 /TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
WATUKUMPUL TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Watukumpul	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Watukumpul	Sekretaris	
3.	Kasubbag Bina Program dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Watukumpul	Anggota	
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
6.	Kepala Seksi dan Ketentraman Ketertiban Umum	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Watukumpul	Anggota	
9.	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tim Teknis	Gigih Panuntun, S.ST
10.	Pengelola Administrasi Pemerintahan Pada Seksi Tata Pemerintahan	Tim Teknis	Aola Dliyaul K. A.Md
11.	Bendahara	Tim Teknis	Pujiyono



**TABEL PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN WATUKUMPUL**

Dasar:

1. Permendagri 90/2019 tentang Klakon Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verval Pemutakhiran Klakon Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verval dan Inventarisasi Pemutakhiran Klakon Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

NO	RENSTRA (Kepmendagri 050-3708)				RENJA (Kepmendagri 050-5889)				KETERANGAN
	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)
	KECAMATAN WATUKUMPUL								
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	Rubah Indikator Kinerja
2	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	Rubah Indikator Kinerja
3	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	dokumen	Rubah Indikator Kinerja
4	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun	dokumen	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	dokumen	Rubah Indikator Kinerja
5	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA- SKPD yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dokumen	Rubah Indikator Kinerja
6	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	Rubah Indikator Kinerja
7	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat yang disusun	dokumen	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	Rubah Indikator Kinerja
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
8	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang/bulan	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Rubah Indikator Kinerja

9	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
10	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah							
11	7.01.01.2.02.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.02.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Rubah Indikator Kinerja
12	7.01.01.2.03.12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	7.01.01.2.03.12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
13	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	stel	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Rubah Indikator Kinerja
14	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang/kegiatan	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Rubah Indikator Kinerja
15	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	orang/kegiatan	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
16	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Rubah Indikator Kinerja
17	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Rubah Indikator Kinerja
18	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis/bulan	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Rubah Indikator Kinerja
19	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Rubah Indikator Kinerja
20	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis/bulan	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Rubah Indikator Kinerja
			Jumlah Penggandaan yang tersedia	Lembar					Rubah Indikator Kinerja
21	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Kegiatan	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Rubah Indikator Kinerja

22	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis pada SKPD yang tertata	jenis	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
23	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Rubah Indikator Kinerja
24	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Rubah Indikator Kinerja
25	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Rubah Indikator Kinerja
26	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang tersedia	unit	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan							
27	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
28	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/bulan	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
29	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	jenis/bulan	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
30	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	orang/bulan	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
31	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	Rubah Indikator Kinerja
32	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	Rubah Indikator Kinerja
33	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Rubah Indikator Kinerja
34	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	unit	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Rubah Indikator Kinerja
35	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
36	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Data Pemerintahan yang termutakhirkan	Data	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
37	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Klegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP Pelayanan yang Tersusun	Dokumen	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
38	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis Pelayanan SPM yang Terfasilitasi	Layanan	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
39	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Terlayani	Kasus	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
40	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Izin Non Usaha yang diterbitkan	Izin	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
41	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Verval DTKS Yang Tersusun Jumlah Surat Non Perizinan yang diterbitkan	Dokumen Surat	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
42	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
43	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan	Orang	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Rubah Indikator Kinerja

44	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orang/Kegiatan	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
45	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Didampingi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang difasilitasi	Desa Lembaga	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
46	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Pelatihan Linmas	Orang	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
47	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	Peraturan	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							

48	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang Tersusun	Dokumen	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	Rubah Indikator Kinerja
49	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Peserta Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tingkat Desa	Orang	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	Rubah Indikator Kinerja
50	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosisal Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	Kasus	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosisal Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Rubah Indikator Kinerja
51	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tema Rapat Koordinasi Forkompimcam	Tema	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
52	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades	Desa/Kegiatan	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
53	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina Buku Administrasi Desa	Desa/Kegiatan	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
54	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa/Kegiatan	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
55	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Uraian Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Orang/Kegiatan	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja

56	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Desa	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
57	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Orang/Kegiatan	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
58	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diterbitkan	Surat	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
59	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes)	Desa/Kegiatan	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
60	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang dimonitoring dan Evaluasi Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Desa/Kegiatan	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja
61	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan Desa	Orang/Kegiatan	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	Rubah Indikator Kinerja

Pemalang, Maret 2022

